



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 41 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

## **BAB II** **BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE** **PERANGKAT DAERAH**

### *Bagian Kesatu* Bentuk Perangkat Daerah

#### Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan diwadahi dalam bentuk dinas.

### *Bagian Kedua* Nomenklatur Perangkat Daerah

#### Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

*Bagian Ketiga*  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan;
- c. Pemberian ijin dan pembinaan serta pengawasan usaha tani dan pengolahannya;
- d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang peternakan;
- e. Pengamanan teknis peternakan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan teknologi, produksi, sarana dan prasarana serta kegiatan usaha di bidang peternakan;
- f. Pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkatusaha tani;
- g. Pelaksanaan pengelolaan distribusi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan hasil produksi ternak;
- i. Penyelenggaraan tata usaha dinas;
- j. Pembinaan teknis UPTD.
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengembangan sumber daya masyarakat dan teknologi, produksi, sarana dan prasarana serta kegiatan usaha dibidang peternakan;
- c. Mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengembangan sumber daya masyarakat dan teknologi, produksi, sarana dan prasarana serta kegiatan usaha

- dibidang peternakan; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

*Bagian Kedua*  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana ;
  - d. Bidang Perbibitan dan Produksi;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemsaran;
  - f. Bidang Penyuluhan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

*Bagian Kesatu*  
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

*Bagian Kedua*  
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan;

- (3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan Melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

*Bagian Ketiga*

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 15

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan teknologi peternakan;
- d. Pengembangan potensi dan pengelolaan pakan ternak;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
- f. Pemberian fasilitasi investasi peternakan;
- g. Penyusunan program penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;



Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas :
  - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
  - b. Seksi Pakan;
  - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 18

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang prasarana dan sarana peternakan.
- (2) Seksi Pakan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih dan pakan, di bidang peternakan.
- (3) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan permodalan/pembiayaan usaha serta investasi peternakan.

*Bagian Keempat*

Bidang Perbibitan dan Produksi

Pasal 19

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi ternak.
- (2) Bidang Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi ternak ruminansia dan non ruminansia di bidang peternakan;
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan/kawasan perbibitan ternak;
- c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit ternak ruminansia dan non ruminansia;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi bibit ternak;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak ruminansia dan non ruminansia;
- i. pemberian izin/rekomendasi bibit ternak ruminansia dan non ruminansia;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi ternak; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi terdiri atas :
  - a. Seksi Perbibitan;
  - b. Seksi Ruminansia;
  - c. Seksi Non Ruminansia.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Perbibitan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi bibit dan mutu ternak;

- (2) Seksi Ruminasia mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi ternak ruminasia;
- (3) Seksi Non Ruminansia mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi ternak non ruminasia.

#### *Bagian Kelima*

#### **Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran**

##### **Pasal 23**

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. perencanaan kebutuhan obat-obat hewan/ternak;
- c. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
- e. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- f. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- g. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas :
  - a. Seksi Kesehatan Hewan;
  - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

*Bagian Keenam*  
Bidang Penyuluhan

Pasal 27

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. . Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan ;
- b. Melaksanaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Mengumpulkan, mengolah, mengemas, dan menyebarkan materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Mengelola kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Memberikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- g. Memantau dan mengevaluasi di bidang penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Penyuluhan terdiri atas :
  - a. Seksi Kelembagaan;
  - b. Seksi Ketenagaan;
  - c. Seksi Metode dan Informasi.

- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

#### Pasal 30

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan peyuluhan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan peyuluhan peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi peyuluhan peternakan dan kesehatan hewan.

#### *Bagian Ketujuh*

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

*Bagian Kedelapan*

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### **Pasal 36**

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 37**

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 38**

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.



Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN**  
**PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 45**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M,
2. ASISTEN III	F
3. Kabag. Orpus.	S
4. KABAG HUKUM	J
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 10 NOVEMBER 2016

BUPATI KONAWE SELATAN,

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 11 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH,

  
**H. SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 41

**LAMPIRAN**

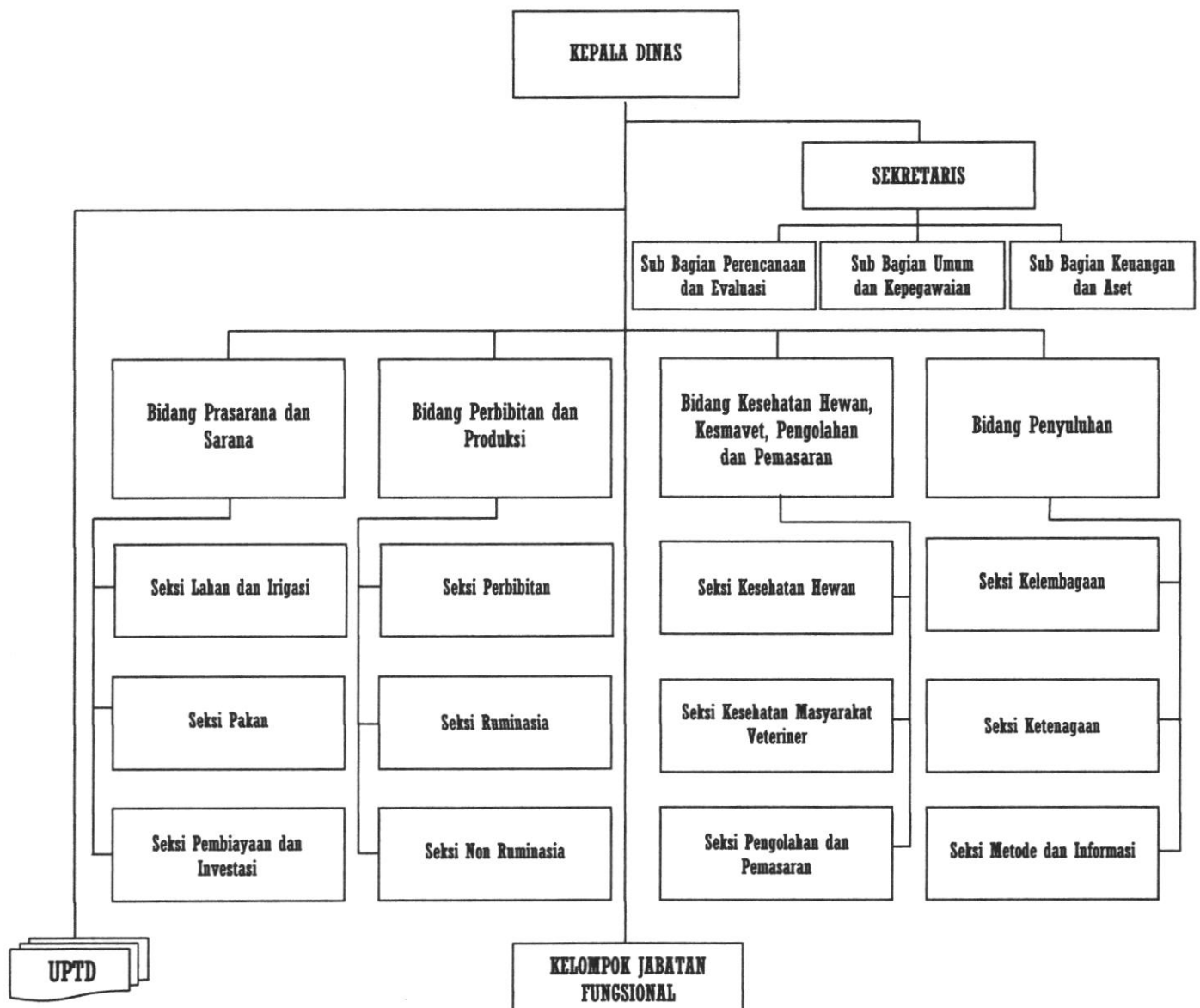
**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 41 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 10 NOVEMBER 2016**

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE A)**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M.
2. Asisten III	+
3. Kabag. Orpus.	8/2
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

*[Signature]*

**H. SURUNUDDIN DANGGA**